

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini pemerintah Republik Indonesia sedang mengupayakan peningkatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka menghadapi era globalisasi dan era perdagangan bebas di tahun 2003 nanti. Untuk itu pemerintah mengupayakannya melalui pembangunan nasional di bidang pendidikan. Untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, sudah tentu seluruh sumber daya perlu didayagunakan secara optimal, termasuk pendayagunaan informasi yang bermutu.

Kedudukan informasi dalam suatu organisasi merupakan salah satu unsur penting yang memberi kemungkinan hidup, berkembang dan memperlancar kegiatan organisasi, baik pada tingkat pembuatan kebijakan maupun pada tingkat operasional. Moch. Idochi Anwar (1986 : 7) mengemukakan bahwa :

Problem-problem dalam pembangunan sistem pendidikan merupakan problem-problem yang muncul setiap saat dan memerlukan usaha-usaha penanggulangan yang serius. Problem tersebut disebabkan oleh makin berkembangnya dan bervariasinya kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan dalam dunia kehidupan manusia.

Informasi yang bermutu diakui sebagai salah satu sumber daya utama organisasi yang menghendaki tindakan manajemen yang memadai terhadapnya (Parker, 1989). Demikian pula Oemar Hamalik (1993 : 13) menyatakan bahwa :

Pengelolaan sistem informasi adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari studi manajemen, sebagaimana halnya pengelolaan ketenagaan,

keuangan, organisasi dan tata laksana, dan lain sebagainya. Barangkali dapat diasumsikan, bahwa pengelolaan sistem informasi merupakan faktor kunci bagi keterlaksanaan dan keberhasilan manajemen.

Dengan demikian keberadaan informasi dengan jumlah dan mutu yang memadai adalah suatu kebutuhan demi kelangsungan hidup organisasi.

Pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan untuk menyiapkan seseorang agar bisa dan mampu hidup di lingkungannya sendiri. Ini berarti pendidikan di Indonesia mengemban dimensi menyiapkan peserta didik yang mampu hidup di Indonesia dengan keragaman ciri lingkungan fisik dan budayanya. Kondisi geografis, demografis dan budaya yang beraneka ragam serta besarnya jumlah penduduk dengan sebaran yang amat luas, menyebabkan sistem pengelolaan pendidikan yang sentralisasi menghadapi tantangan dan permasalahan yang amat besar. Kondisi seperti ini menyebabkan efisiensi sistem pengelolaan pendidikan secara keseluruhan sulit untuk dicapai. Mohammad Fakry Gaffar (1990 : 18) mengemukakan bahwa : "Desentralisasi pendidikan merupakan alternatif sistem pengelolaan yang dapat menjamin terjadinya proses pendidikan yang menekankan kepada kebhinekaan budaya dan kebutuhan untuk menjawab segala tantangan yang dihadapinya". Secara konseptual, desentralisasi dapat diartikan sebagai pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pimpinan kepada bawahan dalam suatu organisasi. Dalam konteks yang lebih aplikatif, Pudjo Sumedi A. S. dan Edison Cholia (1999 : 3) mengemukakan bahwa :

Desentralisasi di bidang pendidikan dimaknai sebagai penyerahan urusan pemerintahan dalam pembangunan pendidikan kepada daerah sehingga wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah, termasuk di dalamnya penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan serta hal-hal yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparat pelaksanaannya.

Dalam pengelolaan pendidikan, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah sebenarnya telah sejak lama dilaksanakan, khususnya untuk pengelolaan Sekolah Dasar (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951). Namun demikian, pemberian wewenang atau otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab masih jauh dari harapan. Peraturan perundangan yang disusun berikutnya adalah PP Nomor 45 Tahun 1992 tentang Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II dan PP Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada Daerah Tingkat II Percontohan. Ternyata dalam implementasinya masih menghadapi banyak masalah yang disebabkan oleh faktor pengaturan yang kurang akomodatif dan belum mampu menyentuh hal yang paling prinsip bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Pudjo Sumedi & Edison Cholia (1999 : 4), yaitu : “Adanya sebagian kewenangan yang disertai dengan tanggung jawab dan sumber daya dukung yang memadai masih kurang menunjukkan tingkat keberhasilan dalam pengimplementasian otonomi daerah”.

Saat ini bangsa Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan reformasi secara bertahap dan konstitusional di segala bidang, antara lain pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan yang mengatur kembali pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam manajemen pendidikan (Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1998) dan Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu implikasi dari kebijakan desentralisasi (otonomi daerah) adalah menyangkut perimbangan keuangan Pusat – Daerah, yang sekarang sudah diatur dengan UU Nomor 25 Tahun 1999. Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor Tahun 1999 khususnya Pasal 12 telah dikeluarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Desentralisasi di bidang pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks yang dapat membawa perubahan-perubahan penting tentang cara sistem pendidikan menciptakan kebijakan, mendapatkan sumber daya, mengeluarkan dana, melatih guru, menyusun kurikulum dan mengelola sekolah-sekolah setempat. Djam'an Satori dan Nanang Fattah (2002 : 9) mengemukakan bahwa :

Desentralisasi pengelolaan pendidikan menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonom yang menempatkan kabupaten/kota sebagai sentra desentralisasi. Pergeseran kewenangan ini berkaitan erat dengan konsentrasi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Artinya, adanya wewenang yang diberikan kepada hierarki lebih bawah dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan ciri penting adanya desentralisasi. Desentralisasi dalam tatanan pemerintahan mengandung arti pula adanya pelimpahan kewenangan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Bersamaan dengan perubahan-perubahan itu, terjadi pergeseran-pergeseran fundamental dalam nilai-nilai yang menjadi ciri khas pendidikan. Pergeseran itu juga berkaitan dengan nilai-nilai yang menyangkut hubungan siswa dan orangtua dengan sekolah, hubungan antara masyarakat dengan pemerintah pusat, dan tentu saja yang menyangkut hakekat dan tujuan pendidikan nasional itu sendiri.

Pergeseran kewenangan yang begitu besar akan membawa dampak pada terjadinya pergeseran paradigma dalam seluruh aspek manajemen pendidikan di daerah, terutama di persekolahan. Paling tidak ada tujuh macam yang perlu diantisipasi, yaitu : kewenangan dan organisasi, personil, kurikulum, sarana dan prasarana, perencanaan program dan anggaran, sistem pengendalian dan pengawasan, serta kepemimpinan (Mulyani A. Nurhadi, 2000 : 1). Dengan demikian, otonomi daerah di bidang pendidikan

sebagai strategi reformasi harus bermuara pada perbaikan proses pendidikan yang pada akhirnya akan berimplikasi pada hasil pendidikan.

Pendidikan sebagai proses dalam mengembangkan sumber daya manusia, pengelolaannya harus semakin baik dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia, termasuk dalam pengelolaan informasi sebagai masukan bagi manajemen pendidikan. Dengan pengelolaan informasi yang lebih baik, akan mampu memberikan bahan bagi pengambilan keputusan pimpinan, pembuatan kebijakan dan penyusunan rencana pendidikan. Moch.

Idochi Anwar (1986 : 9) menyatakan bahwa :

Kebutuhan akan informasi dalam berbagai kegiatan manusia baik kegiatan yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi menunjukkan adanya peningkatan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan sangat ditunjang oleh adanya informasi yang terus menerus mulai dari persiapan kegiatan sampai pada berakhirnya kegiatan tersebut. Dengan kata lain informasi sangat dibutuhkan mulai dari mempersiapkan kegiatan sampai pada pencapaian tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya Oemar Hamalik (1993 : 18) menyatakan bahwa :

Pengelolaan sistem informasi ialah suatu totalitas yang terpadu yang terdiri atas perangkat perencanaan, perangkat transformasi, perangkat komunikasi, pemakai, ketenagaan, organisasi pelaksana, pengendalian dan penilaian yang saling berhubungan, pengaruh mempengaruhi, ketergantungan dan saling terobos satu sama lain dalam rangka penyediaan informasi yang berdaya guna bagi pemakai informasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Dalam Diktat Materi Pelatihan Tenaga Perencana Pendidikan (2001 : 1)

dinyatakan peran penting data dan informasi sebagai berikut :

Dalam perkembangannya dan sesuai dengan teknologi saat ini, pengolahan data sangat diperlukan sehingga dapat dihasilkan informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan. Sesuai dengan perkembangan teknologi, pengolahan data yang banyak dan cepat hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan komputer. Dalam pelaksanaannya, pengolahan data menggunakan komputer merupakan suatu mata rantai yang terdiri dari beberapa kegiatan, yang mana setiap kegiatan tersebut menentukan keberhasilan keluaran pengolahan data tersebut.

Menyadari arti pentingnya data dan informasi, khususnya dalam penyusunan rencana dan evaluasi pendidikan, maka para pengelola pendidikan dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih serius dalam pengelolaan data dan informasi tersebut. Keseluruhan proses pengelolaan data dan informasi tersebut berada dalam suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Burt Scanlan & J. Bernard Keys (Moekijat, 1991 : 13) mengemukakan bahwa : "Suatu sistem informasi manajemen adalah suatu sistem formal mengenai hal melaporkan, menggolongkan dan menyebarkan informasi kepada orang-orang yang tepat dalam suatu organisasi". Demikian pula pendapat Komaruddin (Onong Uchjana Effendy, 1996 : 111), yaitu : "Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem informasi yang memungkinkan pimpinan organisasi mendapatkan informasi dengan jumlah dan mutu serta saat yang tepat untuk dipergunakan dalam rangka pengambilan keputusan".

SIM bukan hanya sebatas proses pengelolaan data dan informasi, sebab hal itu hanya sebagian dari aktivitas di dalamnya. SIM mencakup keseluruhan proses aliran data dan informasi mulai dari identifikasi dan pengumpulan data, identifikasi dan pengumpulan informasi, penyimpanan, penyebaran serta pemanfaatan untuk berbagai kepentingan pelaksanaan tugas organisasi. Komaruddin (Onong Uchjana Effendy, 1996 : 111) mengemukakan bahwa :

Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat meliputi antara lain :

1. Analisis mengenai pelaksanaan organisasi yang dibandingkan dengan informasi yang terlengkap mengenai saingan-saingan;
2. Penggunaan ramalan-ramalan ekonomis atau model-model ekonometrik untuk menetapkan kondisi organisasi yang serupa yang akan ditemukan pada masa yang akan datang;
3. Penggunaan model input-output; dan

4. Tanda-tanda yang lebih cepat mengenai perubahan-perubahan pelaksanaan dari rencana sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum penyimpangan hebat terjadi.

Keseluruhan proses pengelolaan informasi melibatkan banyak komponen, seperti manusia (personil), alat dan fasilitas (komputer), prosedur dan mekanisme kerja, serta aktivitas sistem itu sendiri. Keseluruhan komponen SIM akan berpengaruh terhadap keberhasilan sistem dalam menjalankan fungsinya sebagai sumber data dan informasi bagi pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan penyusunan rencana sehingga perencanaan yang disusun memiliki beberapa kriteria berikut, yaitu: (1) tujuan dirumuskan secara jelas; (2) sederhana dan realistis; (3) memuat analisis-analisis dan penjelasan terhadap usaha-usaha yang direncanakan; (4) bersifat fleksibel dan luwes; (5) ada keseimbangan antara input dan output, keseimbangan antara bagian-bagian dalam perencanaan dan keseimbangan antara tujuan dengan fasilitas yang tersedia; serta (6) efektif dan efisien dalam penggunaan biaya, tenaga dan sumber daya yang tersedia. T. Hani Handoko (1991 : 79) mengemukakan bahwa :

Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap berikut ini :

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan;
2. Merumuskan keadaan saat ini;
3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan; dan
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Lebih tegas Hamzah Ya'qub (1984 : 62) mengemukakan beberapa indikator perencanaan yang efektif, yaitu :

- a. Planning harus betul-betul membantu tercapainya tujuan manajemen (*contributeir*).
- b. Planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen (*primary activity*).
- c. Planning harus mencakup seluruh kegiatan manajemen (*persasivitas*).



- d. Dalam sebuah planning harus selalu ada alternatif (pilihan) baik menyangkut bahan, waktu, tenaga kerja, biaya dan sebagainya, sehingga dapat melakukan alternatif yang paling baik.
- e. Planning harus mempunyai nilai-nilai efisiensi atau penghematan.
- f. Planning harus melihat faktor-faktor yang urgen saja (*limiting factor*), sehingga harus jelas, terang dan tegas, tidak bertele-tele. Faktor-faktor yang tidak penting ditinggalkan saja.
- g. Planning harus mudah disempurnakan, diperbaiki atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu berubah-ubah (*fleksibilitas*).
- h. Planning harus mempunyai strategi untuk dapat diterima oleh semua pihak, agar planning dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Untuk mencapai efektivitas dalam penyusunan rencana sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan informasi yang bermutu. Bermutu tidaknya suatu informasi dapat dilihat dari kriteria berikut sebagaimana dikemukakan oleh Wilkinson (Jogiyanto, 1993 : 147), yaitu :

- 1) *Relevance* (sesuai dengan kebutuhan);
- 2) *Capacity* (kapasitas dari sistem);
- 3) *Timelines* (ketepatan waktu dalam menghasilkan informasi);
- 4) *Accessibility* (kemudahan akses);
- 5) *Flexibility* (keluwesan sistem)
- 6) *Accuracy* (ketepatan dari nilai informasi);
- 7) *Reliability* (keandalan dari sistem);
- 8) *Security* (keamanan dari sistem);
- 9) *Economic* (nilai ekonomi dari sistem); dan
- 10) *Simplicity* (kemudahan sistem digunakan).

Informasi yang bermutu pada dasarnya ditentukan oleh manajemen informasi itu sendiri. Dengan demikian pola kerja manajemen sistem informasi tanpa suatu konsepsi yang jelas sebagai titik pijak, tidak akan menguntungkan karena cenderung tidak komprehensif dalam mengakomodasi kebutuhan informasi secara menyeluruh. Ia cenderung mengacu pada masalah-masalah yang timbul dan bersifat kuratif sehingga mengakibatkan ketidaktersediaan informasi untuk keperluan manajemen. Sistem informasi yang demikian tidak akomodatif dan kurang antisipatif. Dengan demikian manajemen sistem informasi, baik pada tingkat

desain/rancangan maupun pada level operasional merupakan jaminan bagi ketepatan berfungsinya sistem, tidak saja dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang, artinya produk manajemen itu akan menjadi titik tolak berfungsinya sistem dan melalui evaluasi, upaya manajemen akan terus berlanjut ke arah yang lebih baik dan semakin sempurna.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan **efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan pada Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan dalam menganalisis permasalahan dan supaya masalah yang akan diteliti tidak terlalu luas ruang lingkungannya serta terarah pada tujuan yang ingin dicapai, maka permasalahan tersebut perlu dirumuskan secara jelas dan konkrit. Moh. Ali (1993 : 28) menyatakan bahwa : "Rumusan masalah pada hakekatnya adalah generalisasi deskripsi ruang lingkup masalah penelitian dalam pembatasan dimensi dan analisis variabel yang tercakup di dalamnya". Berdasarkan pernyataan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan pada Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.* Dari permasalahan umum tersebut, kemudian dijabarkan lagi ke dalam masalah-masalah khusus yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan pada Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis ?

Pertanyaan di atas menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan : (a) membuat desain/rancangan informasi, (b) pemeliharaan saluran



informasi, (c) seleksi dan transmisi informasi, (d) penerimaan informasi, (e) penyimpanan dan penelusuran informasi, serta (f) penggunaan informasi.

2. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mencapai efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan ?

Pertanyaan tersebut dibatasi pada hal-hal yang menyangkut : (a) penyusunan rencana dan program sistem informasi, serta (b) penyusunan instrumen dalam mendapatkan informasi.

3. Hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam mencapai efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan di Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis ?

Pertanyaan di atas dibatasi pada hal-hal yang menyangkut : (a) penyusunan rancangan sistem, (b) mekanisme dan prosedur, (c) kualitas sumber daya manusia, (d) sarana dan prasarana, serta (e) anggaran atau dana yang tersedia.

4. Kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan dalam mengantisipasi hambatan-hambatan guna mencapai efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan di Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis ?

Pertanyaan di atas dibatasi pada hal-hal yang menyangkut : (a) penyusunan rancangan sistem, (b) mekanisme dan prosedur, (c) kualitas sumber daya manusia, (d) sarana dan prasarana, serta (e) anggaran atau dana yang tersedia.

5. Bagaimana kehandalan informasi yang digunakan oleh Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dalam proses perencanaan ?

Pertanyaan di atas dibatasi pada hal-hal yang menyangkut : (a) kelengkapan, (b) keakuratan, (c) kecepatan, (d) ketepatan waktu, (e) keterbukaan untuk pengembangan, dan (f) kegunaan.

### **C. Pentingnya Masalah**

Pentingnya masalah merupakan manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian. Untuk itu manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian ini selesai dilakukan adalah :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis, khususnya dalam kajian manajemen pendidikan. Dengan kata lain, adanya penelitian ini dapat membantu penulis dalam meningkatkan pemahaman tentang teori dan praktek manajemen pendidikan pada umumnya, dan khususnya manajemen informasi kependidikan sehingga terjadi peningkatan pemahaman penulis sejalan dengan perkembangan ilmu di bidang pendidikan.

2. Segi Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah ilmu perencanaan pendidikan pada khususnya, dan pengembangan disiplin ilmu manajemen pendidikan pada umumnya.

3. Segi Praktek

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi lembaga terkait, yaitu Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan

Kabupaten Ciamis dalam menggunakan informasi ditinjau dari segi proses perencanaan. Khususnya memberikan masukan dalam mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pengelolaan informasi guna penyusunan rencana dan evaluasi pendidikan.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan dan inspirasi bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang meneliti di sekitar masalah perencanaan pendidikan sehingga masalah-masalah pendidikan yang muncul dapat segera diatasi secara benar, tepat dan cepat.

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pegangan atau pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Suharsimi Arikunto (1998 : 52) menyatakan bahwa : "Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai". Sejalan dengan pernyataan tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :

#### 1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan pada Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan pada Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, khususnya menyangkut hal-hal yang berkenaan

- dengan : (a) membuat desain/rancangan informasi, (b) pemeliharaan saluran informasi, (c) seleksi dan transmisi informasi, (d) penerimaan informasi, (e) penyimpanan dan penelusuran informasi, serta (f) penggunaan informasi.
- b. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dalam mencapai efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan, khususnya yang menyangkut : (a) penyusunan rencana dan program sistem informasi, serta (b) penyusunan instrumen dalam mendapatkan informasi.
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui guna mencapai efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan di Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, khususnya yang menyangkut : (a) penyusunan rancangan sistem, (b) mekanisme dan prosedur, (c) kualitas sumber daya manusia, (d) sarana dan prasarana, serta (e) anggaran atau dana yang tersedia.
- d. Untuk mengetahui kiat-kiat yang dilakukan dalam mengantisipasi hambatan-hambatan guna mencapai efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan di Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, khususnya yang menyangkut : (a) penyusunan rancangan sistem, (b) mekanisme dan prosedur, (c) kualitas sumber daya manusia, (d) sarana dan prasarana, serta (e) anggaran atau dana yang tersedia.
- e. Untuk mengetahui kehandalan informasi yang digunakan oleh Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dalam

proses perencanaan, khususnya yang menyangkut : (a) kelengkapan, (b) keakuratan, (c) kecepatan, (d) ketepatan waktu, (e) keterbukaan untuk pengembangan, dan (f) kegunaan informasi tersebut.

#### E. Premis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994 : 787) dinyatakan bahwa premis adalah :

1. Apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan kemudian; dasar pikiran; alasan.
2. Prasangka; asumsi.
3. Kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika.

Bertolak dari pendapat di atas, maka premis-premis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Desentralisasi pengelolaan pendidikan menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah otonom yang menempatkan kabupaten/kota sebagai sentra desentralisasi. Pergeseran kewenangan ini berkaitan erat dengan konsentrasi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Artinya, adanya wewenang yang diberikan kepada hierarki lebih bawah dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan ciri penting adanya desentralisasi (Djam'an Satori & Nanang Fattah, 2002).
2. Kebutuhan akan informasi dalam berbagai kegiatan manusia baik kegiatan yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi menunjukkan adanya peningkatan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan sangat ditunjang oleh adanya informasi yang terus menerus mulai dari persiapan kegiatan sampai pada akhirnya kegiatan tersebut. Dengan kata lain informasi sangat dibutuhkan mulai dari mempersiapkan

kegiatan sampai pada pencapaian tujuan yang diinginkan (Moch. Idochi Anwar, 1986).

3. Sistem Informasi Manajemen adalah pendekatan yang terorganisasi dan terencana untuk memberi eksekutif bantuan informasi yang tepat yang memberi kemudahan bagi proses manajemen (Komaruddin yang dikutip oleh Onong Uchjana Effendy, 1996).
4. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana tersebut (T. Hani Handoko, 1991).
5. Penyusunan suatu perencanaan informasi yang benar-benar berdaya guna bagi sistem informasi tentu saja tidak mudah. Kegiatan perencanaan itu menuntut tingkat keterampilan profesional yang cukup tinggi dan memerlukan keahlian dan pengalaman dalam bidang sistem informasi. Namun demikian, setiap manajer diharuskan membuat perencanaan seperti yang dimintakan oleh kebutuhan organisasi, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi yang bersangkutan (Oemar Hamalik, 1993).

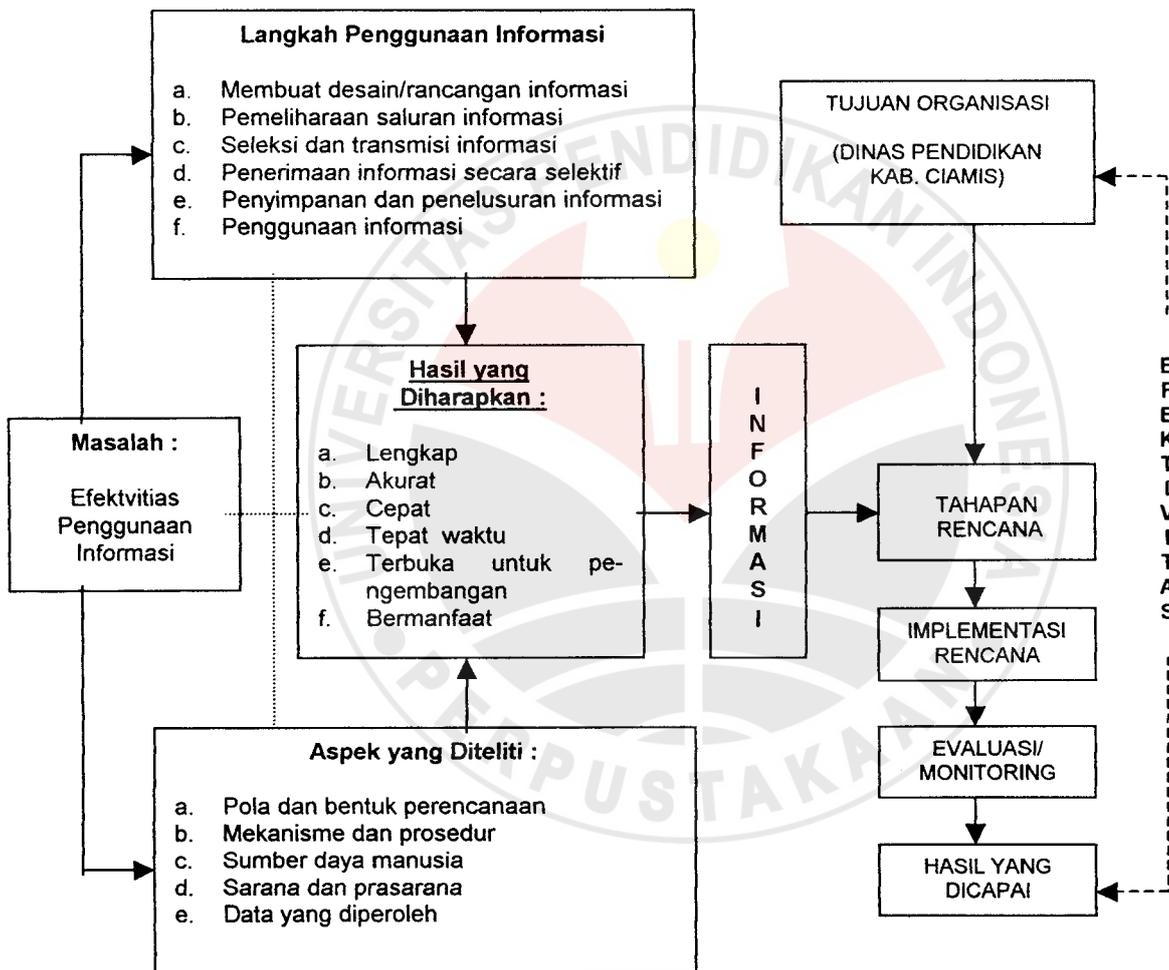
#### **F. Paradigma Penelitian**

Untuk memudahkan dalam memahami alur pemikiran penelitian ini, maka di bawah ini akan digambarkan paradigma yang dipergunakan. Zainuddin Sardar (1986) dalam Masus Sigit Priyogi (1992 : 13) mengemukakan bahwa :

Paradigma penelitian adalah suatu pola atau model yang telah diakui secara universal yang mewakili suatu situasi atau kondisi. Lebih sederhana lagi, seperangkat kebiasaan ilmiah . . . .

Paradigma dapat melihat intelektual, verbal, sikap laku, mekanis, teknologi ataupun semacam ini tergantung pada jenis masalah yang dipecahkan, . . . . Paradigma juga digunakan untuk konsepsi dasar seseorang mengenai aspek realita tertentu.

Sejalan dengan pendapat di atas, secara skematik, paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1  
Paradigma Penelitian

Dalam menyusun perencanaan harus diperhatikan informasi yang tersedia, artinya apakah informasi itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, dipercaya kebenarannya atau tidak, dan dipercaya keakuratannya atau tidak. Hal ini dilakukan agar dapat dihasilkan perencanaan pendidikan yang fleksibel, matang, komprehensif dan mudah diimplementasikan dengan baik. Dengan adanya perencanaan yang baik, tentunya akan berimplikasi pada pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, agar menghasilkan informasi yang bermutu, maka perlu diupayakan adanya peningkatan efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan. Efektivitas penggunaan informasi yang dimaksud meliputi desain/rancangan informasi, pemeliharaan saluran informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi, penyimpanan dan penelusuran informasi, penggunaan informasi, hambatan yang ditemui dan upaya mengatasi hambatan tersebut sehingga diharapkan dapat disusun suatu perencanaan yang efektif.

#### G. Definisi Istilah

1. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan suatu ukuran tentang tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Untuk lebih jelasnya, Abin Syamsudin Makmun (2000 : 20) mengemukakan bahwa :

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai (*achievement, observed outputs*) dengan hasil yang diharapkan (*objectives, targets, intended outputs*) sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan. Parameternya akan dapat diungkapkan sebagai angka nilai rasio antara jumlah hasil (kelulusan, produk jasa, produk barang, dsb. ) yang dicapai dalam kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah (unsur yang serupa) yang diproyeksikan atau ditargetkan dalam kurun waktu tersebut. Berbagai parameter dapat diungkapkan dengan berbagai cara pula.

Selanjutnya Komaruddin (1979 : 83) mengemukakan pengertian efektivitas, yaitu : "Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh organisasi yang bersangkutan". Selanjutnya Gibson, dkk. yang dikutip oleh S. P. Siagian (1988 : 25) mengemukakan bahwa : "Lima aspek yang dapat digunakan sebagai kriteria efektivitas, yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, kemampuan adaptasi dan pengembangan organisasi". Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya aktivitas yang terbaik yang mampu mencapai tujuan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam kegiatan sebelumnya, baik dilihat dari kegiatan produksi, efisiensi, kepuasan, kemampuan adaptasi maupun pengembangan organisasi.

2. M. J. Riley (1981) yang dikutip oleh Moch. Idochi Anwar (1986 : 9) menyatakan bahwa : "Informasi adalah hasil pembentukan, pengorganisasian atau pengubahan data dimana dengan cara itu dapat meningkatkan pengetahuan penerimanya". Sedangkan Gordon B. Davis (Moekijat, 1991 : 9) menyatakan bahwa :

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.

Sejalan dengan pernyataan di atas, maka yang dimaksud informasi dalam penelitian ini adalah data yang telah diolah menjadi suatu bahan yang penting dan berguna yang dijadikan masukan dalam menyusun suatu rencana pendidikan.

3. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Yusuf Enoch, 1995 : 1). Sejalan dengan pernyataan di atas, maka yang dimaksud perencanaan dalam penelitian ini adalah suatu upaya dalam mempersiapkan berbagai kegiatan yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam bidang pendidikan sehingga diharapkan tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dibahas, yaitu masalah efektivitas penggunaan informasi dalam proses perencanaan, dimana masalah ini merupakan masalah yang sedang berkembang pada masa sekarang, maka metode penelitian yang tepat adalah metode deskriptif.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer : pimpinan dan para pegawai di Sub Bagian Bina Program Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- b. Sumber data sekunder : dokumen yang terkait dengan penggunaan informasi dalam proses perencanaan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan terpercaya, peneliti menggunakan tiga teknik utama dalam proses penelitian ini, yaitu teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Berbagai data yang

diperoleh dari ketiga teknik itu disatukan untuk diberi interpretasi agar dapat menghasilkan informasi yang dipercaya kebenarannya sehingga mampu menjawab problematika penelitian dengan tepat.

#### 5. Instrumen Penelitian

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan penelitian kualitatif, maka yang menjadi instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri.

#### 6. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian meliputi dua kegiatan, yaitu pengurusan ijin operasional dan tahapan penelitian yang dimulai dari orientasi, pelaksanaan dan penyusunan laporan.

